

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2021). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Tuntutan terhadap sektor publik, mewajibkan lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Bastian, 2015).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Laporan keuangan adalah suatu penyajian

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya. Karakter tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam perspektif yang berbeda *stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah pusat bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Rizal, 2014).

Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju AkruaI. Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Dewi & Adi, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria

karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan (Evicahyani & Setiawina, 2016).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia. Menurut (Dewi et al., 2022) laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Yaqin & Jatmiko, 2018).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintahan republik indonesia telah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci mengenai elemen-elemen standar akuntansi. Pernyataan tersebut dinamakan pernyataan standar akuntansi sektor publik, yang dalam pemerintahan disebut pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual sebagai masa transisi menuju akuntansi berbasis akrual

penuh yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Untuk mendukung beberapa perubahan dalam standart dan mekanisme penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013, tentang penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah yang menjadi pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Lasabuda et al., 2020). Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (Albugis, 2016). Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi basis akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Sudarsono & Darsono, 2017).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Ikyarti & Aprilia, 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu

Manimpurung dkk., (2018), Ardianto & Eforis, (2019) dan Rohmah *et al.*, (2020) serta Melinda & Ayu, (2021), Widyawati & Ismunawan (2021). Tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil faktor kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini juga mengacu dari penelitian Yaqin & Jatmiko, (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tidak mengambil faktor pemahaman akuntansi, karena pemahaman akuntansi termasuk bagian dari kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemahaman akuntansi merupakan bagian dari kompetensi sumber daya manusia.

Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel profesionalitas pegawai yang diharapkan dapat membuktikan apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh profesionalitas pegawai, mengacu dari penelitian Leviany dkk., (2020) karena Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme seorang profesional akan semakin penting apabila profesionalisme dihubungkan dengan hasil kerja individunya sehingga pada akhirnya dapat memberi keyakinan terhadap laporan keuangan bagi sebuah pemerintahan atau organisasi dimana pegawai bekerja.

Penelitian ini berfokus pada pemerintah Kota Metro di Provinsi Lampung, dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Metro memiliki semangat untuk bergerak ke sistem penyediaan data online yang lebih transparan, serta saat ini mempunyai rencana memiliki program yang bertujuan menyatukan seluruh informasi, sehingga Kota Metro provinsi Lampung hanya memiliki satu sumber data yang sah secara hukum. Data inilah yang harus dipakai oleh instansi pemerintah Kota Metro sendiri, maupun lembaga-lembaga di luar Pemerintah Daerah (PemDa). Data yang menyatu akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi dan menjadi pijakan pembuatan kebijakan yang lebih sah (humas@metrokota.go.id, 2019).

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Metro kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini yang diberikan itu merupakan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Berikut disajikan data hasil rekapitulasi opini BPK Perwakilan Pemerintah Kota Metro Tahun 2017 sd Tahun 2022:

Tabel 1. 1 Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Metro

No	Tahun	Opini
1	2017	WTP
2	2018	WTP
3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP
6	2022	WTP

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Lampung, 2022.

Berdasarkan tabel diatas Pemerintah kota Metro kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian ini merupakan Opini WTP ke-12 kali berturut-turut yang setiap tahunnya didapatkan oleh Pemerintah kota Metro. Tetapi opini WTP belum tentu pegawai pemerintah yang membuat laporan keuangan bebas dari masalah, dilansir dari kabar24.bisnis.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin integritas suatu lembaga, status WTP tidak menjamin sebuah lembaga bebas dari korupsi hanya dengan menilai kesesuaian antara transaksi dan buku laporan keuangan. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kini berstatus tersangka korupsi. Padahal, lembaga tersebut 14 kali menerima status WTP (kabar24.bisnis.com, 2022), dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
2. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
4. Apakah profesionalitas pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bisa dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah:

1. Objek dalam penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro yang beralamat di Jl. AH Nasution Nomor 03 Kota Metro Provinsi Lampung, Kode pos 34111.
2. Variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan profesionalitas pegawai, sedangkan variabel terikat nya adalah Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah profesionalitas pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan akuntansi, khususnya mengenai kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam Lima bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan seperti: sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**